

Realignment Politik Pasca Pilkada di Sumatera Barat

¹M. Fedro Syafiola, ²Muhammad Ziqri

^{1,2}Universitas Andalas

Korespondensi : fedro3103@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transformasi peran pemimpin tradisional (ninik mamak) dalam menghadapi dinamika politik modern, khususnya dalam konteks pasca-Pilkada. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, penelitian ini menggali pergeseran pola relasi antara elit politik, penyandang dana, dan masyarakat, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya perubahan signifikan dalam lanskap politik lokal, di mana fenomena high cost democracy telah menciptakan ketergantungan elit politik terhadap penyandang dana, yang berimplikasi pada terbentuknya pola hubungan patron-klien. Para ninik mamak menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan modernisasi sambil mempertahankan nilai-nilai adat, tercermin dari memudarnya otoritas dalam pengelolaan harta pusaka, berkurangnya peran dalam pendidikan adat, dan menurunnya partisipasi dalam penyelesaian konflik sosial. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, perkembangan teknologi, sistem pendidikan formal, dan perubahan pola ekonomi yang lebih berorientasi individual. Penelitian ini mengungkap perlunya reformulasi peran yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas untuk mempertahankan relevansi kepemimpinan tradisional dalam konteks politik kontemporer.

Kata kunci: Rekonfigurasi Politik, High Cost Democracy, dan Transformasi Kepemimpinan Adat.

Abstract

This study examines the transformation of the role of traditional leaders (ninik mamak) in facing the dynamics of modern politics, especially in the post-Pilkada context. Using a qualitative approach with analytical descriptive methods, this study explores the shift in the pattern of relations between political elites, donors, and the community, and its impact on governance. Data collection was carried out through triangulation methods including documentation studies, in-depth interviews with key informants selected using purposive sampling techniques, and field observations. The results of the study indicate significant changes in the local political landscape, where the phenomenon of high cost democracy has created dependence of political elites on donors, which has implications for the formation of patron-client relationship patterns. The ninik mamak face challenges in adapting to modernization while maintaining customary values, reflected in the fading authority in the management of ancestral property, the reduced role in customary education, and the decreased participation in resolving social conflicts. This shift is influenced by factors such as urbanization, technological developments, the formal education system, and changes in economic patterns that are more oriented towards individuals. This study reveals the need for role reformulation that can integrate traditional values with the demands of modernity to maintain the relevance of traditional leadership in the contemporary political context.

Keyword: Political Reconfiguration, High Cost Democracy, and the Transformation of Indigenous Leadership.

1. PENDAHULUAN

Perubahan konstelasi politik yang terjadi setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat menunjukkan suatu fenomena yang layak mendapat perhatian mendalam, terutama dalam ranah politik di tingkat lokal. Wilayah yang dikenal dengan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang mengakar

kuat ini memperlihatkan bagaimana perpolitikan setempat terjalin dalam suatu jejaring kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan - mulai dari para pemuka adat yang memegang otoritas tradisional, tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh spiritual dan moral, hingga institusi politik formal seperti partai-partai politik yang berperan dalam sistem demokrasi modern. Interaksi dinamis antara ketiga elemen kekuatan sosial-politik ini menciptakan suatu lanskap politik yang unik dan khas di Ranah Minang, di mana keputusan-keputusan politik tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan adat dan nilai-nilai religius yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. (Edward & Ward, 2019). Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan dari 67.06 pada 2018 menjadi 73.00 pada 2020, yang mengindikasikan adanya perubahan lanskap politik pasca Pilkada (Gerald, 2024).

Adanya transformasi signifikan dalam lanskap kekuatan politik yang ditandai dengan hadirnya pemain-pemain baru yang mengandalkan kekuatan modal ekonomi yang substansial. Penyelenggaraan demokrasi yang membutuhkan biaya tinggi (*high cost democracy*) telah membuka pintu lebar bagi masuknya para pemodal sebagai penyandang dana politik, yang pada gilirannya menghasilkan dampak mendalam terhadap tata kelola pemerintahan. Situasi ini telah melahirkan pola relasi patron-klien yang khas, di mana para penyandang dana politik membangun jejaring pengaruh melalui dukungan finansial mereka, sementara para penerima dana terikat dalam hubungan ketergantungan yang berpotensi mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik di kemudian hari. Fenomena ini menggambarkan bagaimana demokratisasi di tingkat lokal telah mengalami pergeseran dari idealismenya, di mana kekuatan ekonomi menjadi faktor yang semakin dominan dalam menentukan arah perpolitikan di Ranah Minang (Wahyuningsih et al., 2020). Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa biaya politik yang tinggi telah mendorong kandidat untuk mencari dukungan finansial dari berbagai pihak, termasuk dari sektor bisnis (Setiawan & Widiana, 2022).

Fenomena ini menarik berupa pergeseran fundamental dalam lanskap kekuasaan politik lokal, di mana dominasi elit tradisional mulai tergeser oleh kemunculan kekuatan ekonomi-politik kontemporer. Perubahan ini terlihat jelas dalam proses pengambilan kebijakan yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada legitimasi adat dan agama, tetapi juga harus mengakomodasi kepentingan ekonomi-politik dari para penyandang dana kampanye, suatu fenomena yang oleh Ross diidentifikasi sebagai bentuk intervensi kekuatan ekonomi dalam proses demokratisasi di tingkat lokal..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses penataan ulang kekuatan politik terjadi setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat, dengan memberikan perhatian khusus pada perubahan pola hubungan yang terjalin antara tiga aktor utama: elit politik, para penyandang dana, dan masyarakat luas. Dengan mengaplikasikan kerangka teoretis yang mengombinasikan teori patron-klien dan konsep demokrasi berbiaya tinggi (*high cost democracy*), penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik kontemporer di tingkat lokal yang sedang berlangsung di Ranah Minang. Lebih dari itu, studi ini juga akan menyelidiki bagaimana dampak dari realignment politik tersebut terhadap dua aspek fundamental dalam kehidupan bernegara: kualitas penyelenggaraan demokrasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat..

Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan analisis dalam mengkaji transformasi elemen kekuasaan tradisional Minangkabau yang bermetamorfosis menjadi kekuatan politik modern melalui praktik *high cost democracy*. Melalui studi mendalam tentang bagaimana modal ekonomi dan jaringan bisnis berinteraksi dengan nilai-nilai adat dan agama dalam kontestasi politik lokal, penelitian ini mengungkap dinamika unik yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian politik lokal Indonesia.

2. METODE

Perubahan peta kekuatan politik yang terjadi setelah Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat, studi ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis sebagai kerangka utama penyelidikan. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada kemampuannya untuk menggali secara mendalam berbagai lapisan kompleksitas dalam dinamika politik lokal, termasuk mengungkap nuansa-nuansa halus dalam pergeseran kekuatan dan jaringan relasi yang terbangun antara para aktor politik, penyokong dana kampanye, dan berbagai lapisan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membedah secara menyeluruh aspek-aspek perubahan politik yang sulit diukur secara numerik atau statistik, seperti fenomena hubungan patron-klien dalam politik lokal, praktek politik transaksional dalam bentuk ijon politik, serta proses transformasi fundamental dalam basis kekuasaan yang bergeser dari tangan elit tradisional menuju kekuatan ekonomi-politik yang lebih modern, di mana semua elemen ini membentuk mozaik politik kontemporer yang kompleks di ranah Minangkabau (Sugiyono, 2008).

Penelitian ini mengimplementasikan strategi pengumpulan data yang komprehensif melalui pendekatan triangulasi metode, yang mengintegrasikan tiga teknik utama pengambilan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Dalam prosesnya, peneliti melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai dokumen kebijakan, menganalisis laporan-laporan resmi, dan mencermati pemberitaan media yang berkaitan dengan dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah. Untuk memperkaya pemahaman, peneliti juga melaksanakan serangkaian wawancara mendalam dengan para informan kunci yang dipilih secara purposif, mencakup spektrum yang luas dari pemangku kepentingan - mulai dari elit politik lokal, tokoh masyarakat yang berpengaruh, kalangan akademisi, hingga para pengamat politik yang memiliki kepakaran dalam dinamika politik daerah. Observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk menangkap manifestasi nyata dari pergeseran kekuatan politik yang terjadi di tingkat akar rumput.

Dalam mengolah dan menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini mengadopsi pendekatan interpretative analysis yang dipadukan dengan content analysis, menciptakan kerangka analisis yang mampu membedah kompleksitas fenomena politik secara menyeluruh. Proses analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan strategis: pertama, melakukan reduksi data untuk menyaring dan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian; kedua, menyajikan data secara sistematis untuk mengorganisir temuan-temuan penting; dan ketiga, merumuskan kesimpulan untuk membangun proposisi yang solid tentang pola realignment politik yang terjadi. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan proses verifikasi melalui member checking dengan para informan kunci serta peer debriefing dengan rekan peneliti, sehingga interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya (Afrizal, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Elit-Pemodal dalam Konstelasi Politik Pasca Pilkada Sumatera Barat

Transformasi fundamental dalam pola relasi kekuasaan yang semakin kompleks. Penelitian mengungkapkan adanya pergeseran paradigmatik dari sistem politik yang sebelumnya bertumpu pada legitimasi tradisional dan nilai-nilai adat, kini bergerak menuju sistem yang lebih didominasi oleh kekuatan modal ekonomi. Fenomena demokrasi berbiaya tinggi (*high cost democracy*) telah menciptakan suatu ketergantungan struktural, di mana para elit politik lokal semakin membutuhkan dukungan finansial dari para penyandang dana untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh politik mereka. Kondisi ini pada gilirannya melahirkan pola hubungan patron-klien yang khas, di mana para penyandang dana membangun jejaring pengaruh melalui dukungan finansial mereka, sementara para elit politik sebagai penerima dana

terikat dalam hubungan ketergantungan yang berpotensi memengaruhi proses pengambilan kebijakan dan tata kelola pemerintahan di kemudian hari, mencerminkan bagaimana demokratisasi di tingkat lokal telah mengalami pergeseran dari idealismenya menuju pragmatisme politik yang berbasis pada kekuatan ekonomi (Aspinall & Berenschot, 2019).

Fenomena politik uang telah mengambil posisi sentral yang mengkhawatirkan dalam lanskap demokrasi elektoral Indonesia. Praktik ini telah berkembang menjadi semacam institusi informal yang mengakar kuat dalam proses pemilihan umum di tingkat lokal, di mana transaksi finansial antara elit politik dan penyandang dana tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan telah menjadi pola yang sistematis dan terstruktur. Di Sumatera Barat khususnya, fenomena ini semakin kompleks karena bersinggungan dengan nilai-nilai adat dan struktur sosial tradisional yang masih kuat, menciptakan dinamika unik di mana legitimasi politik tidak hanya dibangun melalui jalur finansial, tetapi juga harus bernegosiasi dengan otoritas adat dan ekspektasi masyarakat lokal. Situasi ini mencerminkan bagaimana demokrasi elektoral di tingkat lokal telah bertransformasi menjadi arena kontestasi yang sarat dengan kepentingan ekonomi-politik, di mana keberhasilan elektoral seringkali lebih ditentukan oleh kekuatan modal dibandingkan dengan kapasitas kepemimpinan atau kualitas program yang ditawarkan.

Sedangkan (Mietzner, 2020) memberikan analisis mendalam tentang terbentuknya pola patronase kontemporer yang memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan publik. Fenomena ini mengambil bentuk yang khas di Ranah Minang, di mana para elit politik dihadapkan pada tantangan kompleks untuk menyeimbangkan dua kekuatan yang seolah bertolak belakang: modernisasi politik yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan transaksi finansial, serta tuntutan untuk mempertahankan legitimasi tradisional yang berakar pada nilai-nilai adat dan religiositas masyarakat. Situasi unik ini melahirkan dinamika politik yang menuntut keahlian khusus dari para elit politik dalam mengelola beragam kepentingan - di satu sisi harus mengakomodasi ekspektasi para penyandang dana yang menginginkan akses istimewa dan keuntungan ekonomi dari investasi politik mereka, sementara di sisi lain tetap harus memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan kepemimpinan yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan norma-norma adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial-budaya Minangkabau.

Pola Relasi Elit Politik dan Penyandang Dana dalam Konteks Politik Lokal

Hubungan antara elit politik dan penyandang dana dalam konteks politik lokal telah mengalami perubahan yang signifikan, menciptakan pola-pola interaksi yang semakin kompleks dan multidimensi. Pada awalnya, hubungan ini bersifat sederhana dan transaksional, di mana penyandang dana memberikan dukungan finansial untuk kepentingan kampanye politik. Namun seiring waktu, relasi ini berkembang menjadi lebih sophisticated, melibatkan pertukaran kepentingan yang lebih luas dan berjangka panjang. Penyandang dana tidak lagi sekadar berperan sebagai penyedia modal politik, tetapi mulai terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, penempatan orang-orang dalam posisi strategis, hingga pemberian akses istimewa dalam berbagai proyek pembangunan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana demokratisasi di tingkat lokal telah menciptakan ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi yang lebih dominan dalam arena politik.

Pola hubungan antara elit politik dengan penyandang dana dalam kontestasi Pilkada di Sumatera Barat menunjukkan adanya transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya kekuatan politik lebih bertumpu pada legitimasi adat dan agama, kini faktor modal ekonomi menjadi semakin dominan dalam menentukan kemenangan kontestasi politik. Sebagaimana dikemukakan oleh (Aspinall & Berenschot, 2019) "Politik uang telah menjadi fitur sentral dalam demokrasi elektoral Indonesia, menciptakan pola ketergantungan baru antara politisi dengan penyandang dana yang memiliki kepentingan ekonomi."

Fenomena *high cost democracy* telah menciptakan kebutuhan yang besar akan pendanaan politik. Para kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada membutuhkan dukungan finansial yang substansial untuk berbagai keperluan kampanye, mulai dari pengerahan massa, pengadaan atribut kampanye, hingga

pembentukan tim sukses. Kondisi ini membuka ruang bagi masuknya penyandang dana yang memiliki kepentingan ekonomi-politik tertentu.

Relasi yang terbangun antara elit politik dengan penyandang dana umumnya bersifat transaksional dan resiprokal. Para penyandang dana memberikan dukungan finansial dengan ekspektasi mendapatkan akses istimewa atau kebijakan yang menguntungkan apabila kandidat yang didukung memenangkan kontestasi. (Mietzner, 2020) menegaskan: "Hubungan antara penyandang dana dengan politisi di tingkat lokal telah menciptakan lingkaran patronase baru yang mempengaruhi arah kebijakan publik pasca pemilihan."

Di Sumatera Barat, pola hubungan ini memiliki karakteristik unik karena harus bernegosiasi dengan nilai-nilai adat dan agama yang masih kuat. Para elit politik harus mampu membangun legitimasi ganda: di satu sisi memenuhi ekspektasi penyandang dana, di sisi lain tetap menjaga citra sebagai pemimpin yang menghormati nilai-nilai tradisional. Dinamika ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam politik lokal Sumatera Barat.

Transformasi pola relasi antara elit politik dan penyandang dana di Sumatera Barat semakin kompleks dengan masuknya platform digital dan media sosial dalam kampanye politik. (Hamid, 2020), digitalisasi kampanye politik telah menciptakan kebutuhan pendanaan baru yang signifikan, mendorong elit politik untuk semakin bergantung pada penyandang dana yang memiliki kapasitas finansial besar. Hal ini mengubah lanskap politik tradisional yang sebelumnya lebih mengandalkan jaringan sosial berbasis adat dan agama.

Pola patronase yang terbentuk juga mengalami perubahan signifikan dengan masuknya kepentingan bisnis dalam ranah politik lokal. (Nurhasim, 2021) mengemukakan bahwa "relasi antara elit politik dan pengusaha di tingkat lokal telah berevolusi dari sekadar hubungan transaksional menjadi aliansi strategis jangka panjang yang mempengaruhi arah pembangunan daerah." Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan yang cenderung mengakomodasi kepentingan para penyandang dana kampanye.

Menariknya, masyarakat Minangkabau yang dikenal memiliki basis nilai demokrasi lokal yang kuat melalui sistem nagari, merespons dinamika ini dengan cara yang unik. Sebagaimana masyarakat mengembangkan mekanisme kontrol sosial baru yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan tuntutan modernitas politik. Hal ini menciptakan ruang negosiasi baru antara kepentingan ekonomi-politik dengan nilai-nilai tradisional.

Rekonfigurasi kekuatan politik di Sumatera Barat menunjukkan adaptasi lokal terhadap fenomena *high cost democracy*. Munculnya "model hibrid dalam tata kelola politik lokal, di mana elemen modernitas seperti pendanaan kampanye digital berjalan beriringan dengan mekanisme legitimasi tradisional." Model ini menjadi karakteristik khas politik lokal Sumatera Barat kontemporer.

Implikasi Relasi Elit-Pemodal Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Lokal

Hubungan yang terjalin antara elit politik dan penyandang dana memiliki implikasi mendalam terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Pertama, relasi ini seringkali menciptakan dilema dalam pengambilan kebijakan publik, di mana kepentingan penyandang dana yang telah mendukung elit politik dalam kontestasi elektoral harus dipertimbangkan, bahkan terkadang dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Kedua, pola hubungan patron-klien yang terbentuk cenderung melanggengkan praktik-praktik nepotisme dan kronisme dalam birokrasi, di mana penempatan jabatan strategis lebih didasarkan pada loyalitas terhadap patron daripada kompetensi. Ketiga, fenomena ini berkontribusi pada *high cost democracy*, menciptakan *barrier to entry* yang tinggi bagi kandidat potensial yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya finansial yang besar. Pada akhirnya, situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Fenomena ketergantungan finansial muncul sebagai faktor krusial yang membentuk dinamika pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Kondisi ini termanifestasi dalam bentuk ketergantungan struktural di mana para elit politik lokal sangat mengandalkan dukungan finansial dari para penyandang dana untuk berbagai keperluan, mulai dari pendanaan kampanye politik hingga operasional pemerintahan. Situasi ketergantungan ini menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana para pembuat kebijakan seringkali harus mengkompromikan independensi mereka dalam pengambilan keputusan untuk mengakomodasi kepentingan para pemodal yang telah memberikan dukungan finansial. Lebih jauh lagi, pola ketergantungan ini tidak hanya mempengaruhi proses electoral democracy tetapi juga berdampak pada keseluruhan aspek tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal penempatan jabatan strategis, alokasi anggaran pembangunan, hingga penetapan regulasi yang seringkali lebih mencerminkan kepentingan pemodal daripada aspirasi publik. Fenomena ini pada akhirnya menciptakan tantangan serius bagi upaya mewujudkan good governance yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. (World Bank, 2022).

Ketergantungan finansial telah menciptakan dampak fundamental terhadap proses pengambilan kebijakan publik di tingkat lokal. Implikasi paling signifikan terlihat dari berkurangnya otonomi elit politik dalam mengambil keputusan strategis, dimana penyandang dana yang telah memberikan dukungan finansial substantial seringkali memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah kebijakan. Situasi ini menciptakan dilema serius, karena kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan kepentingan para pemodal daripada kebutuhan nyata masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama. Lebih jauh lagi, ketergantungan finansial ini juga berdampak pada keberlanjutan program-program pembangunan, dimana kontinuitas berbagai kebijakan publik menjadi sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dari para penyandang dana, menciptakan ketidakpastian dalam implementasi program-program strategis pemerintahan.

Persoalan ketergantungan finansial ini juga membawa implikasi mendalam terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan publik secara keseluruhan. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi dan kepentingan penyandang dana seringkali mendorong pengambilan keputusan yang tergesa-gesa atau tidak optimal, mengabaikan proses kajian mendalam yang seharusnya menjadi landasan setiap kebijakan publik. Dalam banyak kasus, fokus pemerintahan lokal beralih dari upaya mencapai tujuan kebijakan yang substansial menjadi sekadar pemenuhan indikator-indikator formal yang ditetapkan oleh pemberi dana. Situasi ini pada akhirnya menciptakan distorsi dalam tata kelola pemerintahan, di mana pertimbangan kepentingan ekonomi para pemodal seringkali mengalahkan aspek-aspek penting lainnya seperti sustainabilitas program, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat (Linawati et al., 2021).

Kredibilitas institusi pembuat kebijakan mengalami tantangan serius akibat ketergantungan finansial yang kuat terhadap para pemodal. Persepsi publik tentang lemahnya independensi lembaga pemerintahan telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, yang pada gilirannya berdampak pada tingkat kepatuhan dan dukungan publik dalam implementasi berbagai program pembangunan. Situasi ini semakin diperumit dengan munculnya skeptisisme publik terhadap motif di balik setiap kebijakan strategis yang diambil, terutama yang berkaitan dengan alokasi sumber daya dan penetapan prioritas pembangunan daerah.

Transformasi lanskap politik di Sumatera Barat pasca-pilkada menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana terjadi pergeseran signifikan dalam peta kekuatan politik tradisional. Dominasi partai-partai berbasis Islam yang selama ini menjadi pilar utama kekuatan politik lokal mulai mendapat tantangan serius dari munculnya koalisi-koalisi baru yang mengusung agenda perubahan dan modernisasi pembangunan. Fenomena ini diperkuat dengan hadirnya generasi baru pemimpin politik yang tidak hanya mengandalkan basis massa tradisional, tetapi juga mampu membangun jejaring lintas kelompok dan mengoptimalkan platform digital untuk menjangkau konstituensi yang lebih luas, khususnya kalangan milenial. Pergeseran ini mencerminkan evolusi dalam strategi politik yang lebih adaptif terhadap tuntutan

kontemporer, sembari tetap mempertahankan elemen-elemen kearifan lokal yang menjadi karakteristik khas masyarakat Minangkabau.

Komunikasi politik dan peran pemangku adat dalam konteks Minangkabau menghadirkan dimensi unik dalam dinamika kekuasaan kontemporer. Para pemangku adat tidak lagi sekadar berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari level nagari hingga provinsi. Adaptabilitas nilai-nilai tradisional terhadap sistem demokrasi modern terlihat dari bagaimana legitimasi kultural dimanfaatkan sebagai modal politik dalam berbagai kontestasi kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi politik di Sumatera Barat tidak serta merta menghilangkan peran institusi adat, melainkan menciptakan ruang negosiasi baru antara tradisi dan modernitas yang mencerminkan karakteristik khas budaya Minangkabau dalam merespons perubahan zaman (Kurnia et al., 2022).

Mekanisme pertukaran kepentingan antara elit politik dan penyandang dana dengan kata-katanya

Mekanisme pertukaran kepentingan antara elit politik dan penyandang dana telah berkembang menjadi fenomena yang sangat kompleks dan multidimensional. Hubungan ini mencerminkan suatu pola interaksi yang dibangun atas dasar keuntungan bersama, di mana elit politik sangat membutuhkan sokongan finansial untuk berbagai aktivitas politik mereka, mulai dari pembiayaan kampanye, pengelolaan operasional partai, hingga pendanaan berbagai program politik yang membutuhkan dukungan dana substantial (Ata, 2022). Di sisi lain, para penyandang dana, yang umumnya berasal dari kalangan pengusaha atau kelompok kepentingan dengan kapasitas finansial yang kuat, memiliki agenda dan kepentingan spesifik yang mereka harapkan dapat diakomodasi melalui berbagai kebijakan dan keputusan politik yang diambil oleh para elit yang mereka dukung.

Proses pertukaran kepentingan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk dukungan finansial yang diberikan oleh para penyandang dana, baik melalui jalur formal maupun informal. Mekanisme dukungan dapat berupa kontribusi langsung untuk pendanaan kampanye, bantuan operasional untuk aktivitas partai politik, hingga penyediaan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para politisi. Sebagai timbal balik atas dukungan yang diberikan, para penyandang dana mengharapkan sejumlah keuntungan strategis, seperti kemudahan dalam mendapatkan akses ke proyek-proyek pemerintah, kebijakan yang berpihak pada kepentingan bisnis mereka, serta perlindungan dan jaminan keberlangsungan aktivitas ekonomi mereka. Pola hubungan resiprokal ini pada akhirnya menciptakan suatu jejaring kekuasaan yang saling bergantung, di mana keputusan-keputusan politik seringkali tidak terlepas dari pertimbangan kepentingan para penyandang dana (Yaqin, 2021).

"Hubungan antara elit politik dan penyandang dana menciptakan jejaring kekuasaan yang kompleks, di mana keputusan politik seringkali tidak terlepas dari kepentingan ekonomi para donor."
(Robert Dahl, 2018)

Mekanisme pertukaran kepentingan antara elit politik dan penyandang dana menghadirkan dilema fundamental yang memengaruhi kualitas sistem demokrasi. Meskipun pendanaan politik merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan untuk menggerakkan roda demokrasi, ketergantungan yang berlebihan terhadap para penyandang dana telah menciptakan ancaman serius terhadap independensi proses pengambilan keputusan politik. Situasi ini semakin mengkhawatirkan ketika kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan sekelompok elit ekonomi tertentu, mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi yang sehat.

Perkembangan globalisasi ekonomi dan politik telah mendorong terbentuknya ekosistem politik-ekonomi yang semakin kompleks dan saling terkoneksi, di mana pertukaran kepentingan tidak lagi terbatas pada skala domestik tetapi telah meluas hingga melibatkan jaringan internasional. Elit politik kontemporer kini membangun relasi dengan para penyandang dana yang memiliki jangkauan global, menciptakan pola

interaksi yang jauh melampaui sekadar pertukaran sumber daya finansial. Hubungan yang terjalin mencakup berbagai dimensi strategis, mulai dari pertukaran informasi yang bersifat eksklusif, akses ke jejaring bisnis internasional, hingga berbagai bentuk dukungan non-finansial yang semakin memperkuat posisi tawar masing-masing pihak dalam konstelasi politik-ekonomi global.

Era digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam pola relasi antara elit politik dan penyandang dana, di mana teknologi digital dan media sosial menciptakan lanskap baru yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih sophisticated dan tersembunyi. Platform-platform digital tidak hanya menyediakan sarana komunikasi yang lebih efisien, tetapi juga memberikan peluang untuk melakukan transaksi melalui mekanisme yang sulit dilacak oleh pengawasan publik. Inovasi teknologi seperti cryptocurrency, sistem komunikasi terenkripsi, dan berbagai bentuk teknologi finansial mutakhir telah menciptakan dimensi baru dalam pertukaran kepentingan, membuat upaya regulasi dan pengawasan terhadap praktek-praktek ini menjadi tantangan yang semakin kompleks bagi institusi pengawas dan masyarakat sipil.

Dampak dari mekanisme pertukaran kepentingan ini terhadap kualitas demokrasi juga semakin terlihat jelas. Ketika kebijakan publik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan para penyandang dana, muncul fenomena 'captured democracy' di mana lembaga-lembaga demokratis secara formal tetap berjalan namun substansinya telah dikendalikan oleh kepentingan modal. Hal ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara aspirasi publik dengan realitas kebijakan yang dihasilkan. Fenomena ini juga berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokratis dan meningkatnya skeptisisme terhadap proses politik formal.

Upaya-upaya regulasi dan pengawasan yang dilakukan untuk membatasi pengaruh penyandang dana dalam politik seringkali menghadapi tantangan serius. Para elit politik dan penyandang dana telah mengembangkan berbagai strategi sophisticated untuk menghindari regulasi yang ada. Mereka memanfaatkan celah-celah hukum, menggunakan perusahaan-perusahaan shell, dan membangun jaringan informal yang sulit dideteksi. Situasi ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya kapasitas lembaga pengawas untuk mengimbangi kompleksitas transaksi yang terjadi.

Dalam jangka panjang, mekanisme pertukaran kepentingan ini berpotensi menciptakan distorsi sistemik dalam proses demokratisasi. Ketika akses terhadap kekuasaan politik semakin tergantung pada dukungan finansial, maka terjadi eksklusi terhadap kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang besar. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elit, sementara mayoritas masyarakat semakin termarginalisasi dari proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Transformasi struktural diperlukan untuk memutus mata rantai ini, namun hal tersebut membutuhkan perubahan fundamental dalam sistem politik dan ekonomi yang ada.

Transformasi Otoritas Tradisional dalam Politik Kontemporer

Perubahan mendasar terjadi dalam cara tokoh adat dan agama mengejawantahkan peran mereka dalam arena politik. Jika sebelumnya mereka bertindak sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan politik, kini posisi tersebut harus berbagi dengan kekuatan-kekuatan baru yang muncul, terutama dari kalangan pengusaha dan teknokrat. Tokoh adat yang dulunya memiliki otoritas penuh dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat, kini harus beradaptasi dengan realitas politik modern di mana faktor modal dan kapasitas manajemen pemerintahan menjadi pertimbangan utama pemilih.

Pada Zaman sekarang, banyak tokoh adat yang kemudian mengembangkan strategi adaptif, menggabungkan legitimasi tradisional mereka dengan pendekatan politik modern. Beberapa di antaranya bahkan mulai terlibat dalam aktivitas ekonomi atau membangun aliansi dengan para pengusaha, menciptakan sintesis unik antara otoritas adat dan kekuatan ekonomi. Pergeseran ini menandai transformasi

peran mereka dari "penjaga nilai" menjadi "mediator perubahan" yang menjembatani tradisi dengan tuntutan modernisasi.

Transformasi peran tokoh adat dan agama dalam konteks politik modern telah menciptakan dinamika baru dalam tata kelola masyarakat. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan legitimasi tradisional sebagai basis kekuasaan, tetapi juga mulai mengadopsi berbagai pendekatan pragmatis untuk mempertahankan relevansi mereka. Hal ini terlihat dari munculnya tokoh-tokoh adat yang aktif dalam kegiatan bisnis, organisasi sosial modern, dan bahkan partai politik. Adaptasi ini menunjukkan bahwa para pemimpin tradisional memiliki kemampuan untuk membaca perubahan zaman dan meresponnya secara strategis.

Salah satu fenomena menarik yang dapat diamati adalah bagaimana tokoh adat mulai membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan. Mereka menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk mempertahankan pengaruh sosial-politik, tetapi juga membuka peluang baru untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, tokoh adat dapat mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan pembangunan modern.

Peran Pemangku Adat dalam Arena Politik Modern

Pergeseran yang menarik dalam peran mamak sebagai tokoh adat Minangkabau, khususnya dalam konteks ritual pernikahan dan pengelolaan harta pusaka. Secara historis, mamak memegang posisi yang sangat penting dalam struktur sosial Minangkabau, di mana seorang paman dari pihak ibu tidak hanya bertanggung jawab membimbing kemenakannya dalam aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki otoritas dalam pengelolaan harta pusaka dan pelaksanaan berbagai ritual adat yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Minangkabau (Afdhal, 2023).

Transformasi sosial yang terjadi dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci yang saling berkaitan. Kesenjangan dalam proses pewarisan pengetahuan tradisional antara generasi senior dan junior telah mengakibatkan minimnya pemahaman para mamak muda terhadap ritual-ritual adat yang ada. Fenomena perpindahan penduduk ke kota dan merantau juga berkontribusi pada ketidakhadiran banyak mamak di kampung asalnya. Selain itu, dampak modernisasi telah mengubah prioritas masyarakat yang kini lebih mementingkan pendidikan formal dibandingkan pembelajaran adat istiadat. Bersamaan dengan itu, masuknya nilai-nilai modern ke dalam kehidupan masyarakat telah mengikis kekuatan sistem kekerabatan yang berbasis pada garis keturunan ibu (Hidayat et al., 2023).

Dampak dari pergeseran ini cukup serius bagi tatanan sosial-budaya Minangkabau. Terjadi pelemahan otoritas mamak dalam keluarga besar, berkurangnya rasa hormat kemenakan kepada mamak kandung, dan komersialisasi peran adat yang seharusnya sakral. Di Nagari Mungka misalnya, fenomena pembayaran jasa mamak rental telah mengubah esensi hubungan mamak-kemenakan dari ikatan moral-kultural menjadi transaksi ekonomi.

Perubahan ini juga berdampak pada sistem nilai dan pendidikan adat. Mamak yang seharusnya bertanggung jawab mendidik kemenakan dalam hal adat istiadat, agama dan moral, kini lebih fokus pada keluarga inti mereka sendiri. Akibatnya, generasi muda Minangkabau semakin terputus dari akar budayanya, dan ritual-ritual adat beresiko menjadi sekadar formalitas tanpa pemahaman mendalam akan maknanya.

Tantangan modernisasi dan globalisasi tetap menuntut adanya adaptasi peran mamak yang dapat menjembatani tradisi dengan tuntutan zaman modern, tanpa kehilangan esensi kulturalnya sebagai pemimpin adat dan pembimbing kemenakan.

Pergeseran peran mamak dalam struktur sosial Minangkabau merepresentasikan dinamika kompleks antara tradisi dan modernitas. Fenomena ini tidak hanya menyangkut perubahan fungsi ritual, tetapi juga

mencerminkan transformasi mendasar dalam sistem nilai dan relasi sosial masyarakat. Ketika peran mamak yang dahulu sentral dalam pengambilan keputusan keluarga dan pengelolaan harta pusaka mulai tereduksi, hal ini menandakan pergeseran paradigma dalam memahami dan menjalankan adat istiadat Minangkabau. Perubahan ini semakin terasa ketika muncul fenomena "mamak rental" yang secara fundamental bertentangan dengan filosofi dasar hubungan mamak-kemenakan yang seharusnya dibangun atas dasar ikatan emosional dan tanggung jawab moral (Khusairi et al., 2023).

Modernisasi telah membawa dampak multidimensional terhadap institusi mamak dalam adat Minangkabau. Di satu sisi, urbanisasi dan mobilitas sosial yang tinggi telah menciptakan jarak fisik dan kultural antara mamak dengan kemenakannya. Banyak mamak yang merantau atau tinggal di kota besar demi pendidikan dan pekerjaan, sehingga tidak dapat menjalankan peran tradisionalnya secara optimal. Di sisi lain, perubahan orientasi nilai dalam masyarakat telah menggeser fokus dari kekerabatan matrilineal kepada keluarga inti, menyebabkan banyak mamak lebih memprioritaskan tanggung jawab mereka sebagai suami dan ayah dibandingkan peran adat mereka terhadap kemenakan.

Implikasi dari pergeseran ini sangat signifikan bagi keberlangsungan adat Minangkabau. Ketika pengetahuan dan kearifan tradisional tidak lagi ditransmisikan secara efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya, muncul kesenjangan pemahaman yang semakin lebar antara generasi tua dan muda tentang nilai-nilai adat. Hal ini diperparah dengan masuknya nilai-nilai modern yang cenderung individualistis dan materialistis, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip komunal dalam adat Minangkabau. Akibatnya, banyak ritual adat yang dahulu memiliki makna mendalam kini sekadar menjadi prosesi formal tanpa pemahaman substansial dari para pelakunya.

Fenomena komersialisasi peran mamak melalui praktik "mamak rental" merupakan manifestasi nyata dari degradasi nilai adat. Ketika peran yang seharusnya didasari oleh tanggung jawab moral dan kultural berubah menjadi transaksi ekonomi, hal ini tidak hanya mendistorsi makna hubungan mamak-kemenakan, tetapi juga mengancam legitimasi sistem adat secara keseluruhan. Di berbagai nagari di Minangkabau, praktik ini telah menimbulkan keprihatinan di kalangan pemuka adat dan cendekiawan, yang melihatnya sebagai simptom dari krisis identitas kultural yang lebih luas (Yusuf & Effendi, 2021).

Menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya serius untuk merevitalisasi peran mamak dalam konteks kontemporer. Hal ini bukan berarti kembali ke masa lalu secara utuh, melainkan menemukan cara untuk mengadaptasi nilai-nilai tradisional agar tetap relevan dengan tuntutan zaman modern. Diperlukan dialog intensif antara generasi tua dan muda, serta antara pemangku adat dengan kalangan akademisi, untuk merumuskan strategi pelestarian nilai adat yang efektif tanpa mengabaikan realitas perubahan sosial yang tak terelakkan.

Reorientasi Otoritas Tradisional Adaptasi Pemangku Adat di Era Politik Modern

peran ninik mamak sebagai pemimpin tradisional telah mengalami transformasi fundamental yang mencerminkan pergeseran nilai dan struktur masyarakat kontemporer. Bila sebelumnya ninik mamak memegang otoritas komprehensif dalam membimbing kehidupan anak kemenakan - mencakup aspek pendidikan, pembinaan ekonomi, dan pengelolaan harta pusaka - kini peran tersebut mengalami erosi signifikan akibat berbagai faktor perubahan sosial yang tak terelakkan. Pergeseran ini tidak hanya menyangkut pengurangan fungsi praktis ninik mamak dalam struktur keluarga besar, tetapi juga mencerminkan transformasi lebih luas dalam cara masyarakat Minangkabau memahami dan menjalankan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana institusi adat harus terus bernegosiasi dengan tuntutan zaman modern, di mana otoritas tradisional tidak lagi dapat dijalankan secara absolut seperti di masa lalu, melainkan harus beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berubah tanpa kehilangan esensi kulturalnya sebagai penjaga nilai-nilai adat Minangkabau (Oktavia & Yoskar Kadarisman, 2013).

Pergeseran fundamental dalam sistem transmisi pengetahuan dan nilai-nilai tradisional. Institusi pendidikan formal telah mengambil alih peran ninik mamak yang sebelumnya menjadi sumber utama pembelajaran adat dan kearifan lokal. Generasi muda kini lebih mengandalkan pendidikan sekolah dan universitas untuk memperoleh pengetahuan, sementara pemahaman mereka terhadap kompleksitas adat istiadat dan petatah-petiti Minangkabau yang kaya makna semakin terkikis. Fenomena ini berjalan seiring dengan melemahnya otoritas tradisional ninik mamak dalam pengelolaan harta pusaka kaum. Tanggung jawab sakral untuk menjaga dan mengelola harta pusaka demi kesejahteraan kolektif anak kemenakan mulai terabaikan, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, muncul praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai adat, seperti penjualan harta pusaka oleh oknum ninik mamak untuk kepentingan pribadi. Situasi ini mencerminkan degradasi tidak hanya pada level praktis pengelolaan aset komunal, tetapi juga pada tataran filosofis pemahaman akan makna dan fungsi kepemimpinan adat dalam masyarakat Minangkabau kontemporer (Dewi et al., 2023).

Perkembangan teknologi dan modernisasi telah menciptakan transformasi fundamental dalam pola interaksi antara ninik mamak dan anak kemenakan di Minangkabau. Era digital dengan kehadiran media sosial dan komunikasi seluler telah menggeser paradigma komunikasi tradisional yang sebelumnya mengandalkan pertemuan tatap muka sebagai medium utama penyampaian nilai-nilai adat dan bimbingan moral. Meskipun teknologi modern menawarkan kemudahan komunikasi, namun interaksi virtual ini seringkali kehilangan dimensi kedalaman dan makna yang menjadi esensi dari hubungan ninik mamak dengan anak kemenakan. Situasi ini menuntut adanya adaptasi dalam metode pemberian nasihat dan bimbingan yang dapat mengintegrasikan keunggulan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental dari interaksi adat.

Perubahan sistem politik dan pemerintahan, peran ninik mamak menghadapi tantangan signifikan berupa dualisme kepemimpinan antara otoritas adat dan struktur pemerintahan formal. Transformasi sistem administrasi dari nagari tradisional ke pemerintahan desa modern telah menciptakan tumpang tindih kewenangan yang seringkali berujung pada konflik kepentingan. Ninik mamak yang dahulu memegang otoritas penuh dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari, kini harus bernegosiasi dan berbagi kekuasaan dengan aparat pemerintah formal seperti kepala desa dan perangkatnya. Situasi ini tidak jarang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan atau pendekatan dalam penanganan berbagai persoalan komunal.

Tantangan ekonomi modern memberikan dimensi kompleksitas tersendiri bagi eksistensi kepemimpinan ninik mamak. Benturan antara sistem ekonomi kapitalis yang menekankan kepemilikan individual dengan konsep harta pusaka komunal yang menjadi fondasi ekonomi adat Minangkabau telah menciptakan dilema serius. Generasi muda yang tumbuh dalam iklim kompetisi ekonomi modern cenderung lebih tertarik mengejar kesuksesan individual daripada mempertahankan dan mengembangkan aset komunal. Degradasi sistem ekonomi berbasis adat ini secara langsung mengikis salah satu pilar utama yang menopang otoritas ninik mamak dalam struktur sosial Minangkabau.

Merespon berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformulasi peran ninik mamak yang lebih adaptif namun tetap mempertahankan esensi kepemimpinan tradisional. Pendekatan yang bisa ditempuh antara lain meliputi peningkatan kapasitas ninik mamak dalam literasi digital dan teknologi informasi, revitalisasi sistem ekonomi adat yang diselaraskan dengan prinsip ekonomi modern tanpa kehilangan nilai-nilai komunal, serta pengembangan model kolaborasi yang lebih konstruktif dengan sistem pemerintahan formal. Upaya ini perlu didukung dengan modernisasi mekanisme penyelesaian konflik adat yang tetap berpijak pada kearifan lokal, sehingga kepemimpinan ninik mamak dapat mempertahankan relevansinya dalam konteks masyarakat modern tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

4. KESIMPULAN

Realignment Politik Pasca Pilkada di Sumatera Barat mengungkapkan transformasi fundamental dalam lanskap politik lokal yang ditandai dengan pergeseran kekuasaan dari basis tradisional menuju kekuatan ekonomi-politik baru. Fenomena high cost democracy telah menciptakan ketergantungan struktural antara elit politik dan penyandang dana, melahirkan pola hubungan patron-klien yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Studi ini juga mengidentifikasi perubahan signifikan dalam peran pemimpin tradisional (ninik mamak), yang menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan modernisasi sambil mempertahankan nilai-nilai adat, tercermin dari memudarnya otoritas dalam pengelolaan harta pusaka, berkurangnya peran dalam pendidikan adat, dan menurunnya partisipasi dalam penyelesaian konflik sosial. Transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti urbanisasi, perkembangan teknologi, sistem pendidikan formal, dan perubahan pola ekonomi yang lebih berorientasi individual, menunjukkan kompleksitas dinamika antara tradisi dan modernitas dalam politik lokal Sumatera Barat kontemporer.

5. SARAN

Tantangan dalam realignment politik pasca Pilkada di Sumatera Barat, diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa inisiatif strategis: penguatan kapasitas ninik mamak dalam literasi digital dan teknologi informasi, pengembangan sistem ekonomi yang mengintegrasikan konsep harta pusaka komunal dengan prinsip ekonomi modern, pembentukan forum dialog reguler antara pemangku adat dan pemerintah daerah, serta modernisasi mekanisme penyelesaian konflik yang tetap berpijak pada kearifan lokal. Selain itu, perlu dibentuk regulasi yang memberikan pengakuan formal terhadap peran pemimpin tradisional dalam sistem pemerintahan modern, disertai dengan mekanisme pengawasan berbasis adat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan antara kepentingan tradisional dan modern dalam tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afdhal, A. (2023). an Examination of Traditional Customs in Minangkabau Leadership Tradition: Continuity and Changes in the Modern Era. *Publicus : Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 119–134. <https://doi.org/10.30598/publicusvol1iss2p119-134>
- [2] Afrizal, M. A. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- [3] Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019a). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- [4] Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019b). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [5] Ata, N. (2022). Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah; Studi Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (Dak) Pendidikan. *Journal of Governance Innovation*, 4(1), 65–83. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1187>
- [6] Edward, A., & Ward, B. (2019). *Demokrasi For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- [7] Geraldy, G. (2024). Konstelasi Politik Klientelisme Gus Ali: Studi Relasi Kuasa Patron–Klien Gus Ali di dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor-Subandi. *Journal of Politica Governo*, 1(2), 5–19.
- [8] Hamid, S. (2020). *Digital Politics and Electoral Dynamics in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- [9] Hidayat, R., Fitria Dewi, S., & Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P. (2023). Pergeseran peran mamak kaum ke mamak di luar kaum dalam prosesi pernikahan adat. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 2798–6020.
- [10] Khusairi, A., Nasir, M., & Fata, A. K. (2023). Kemenangan Ideologis dan Kekalahan Politik Wacana Politik Etnis Minang dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 13(2), 24–51. <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.24-51>
- [11] Kurnia, L., Sarmiati, S., & Arif, E. (2022). Komunikasi politik anggota DPRD provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 77–91.
- [12] Linawati, Y., Suzantia, H., & Wibowo, M. G. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12547>
- [13] Mietzner, M. (2020). Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and its Trials. *Democratization*, 27(8), 45.
- [14] Nurhasim, M. (2021). Transformasi Politik Lokal: Studi tentang Pergeseran Kekuasaan di Era Digital. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 145-168.
- [15] Setiawan, H., & Widyana, M. R. (2022). High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 1–18.
- [16] Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*.
- [17] Wahyuningsih, D., Qodir, Z., & Syarifuddin, T. I. (2020). Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 64–83. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.7>
- [18] World Bank. (2022). *Financial Dependency and Policy Independence: Challenges and Solutions in Developing Economies* (World Bank Policy Research Working Paper Series.).
- [19] Yaqin, M. A. (2021). Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 73–96. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8597>
- [20] Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2021). Eksistensi Pemangku Adat dalam Pengambilan Keputusan Desa di Kerinci. *Tanah Pilih*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672>